

Dinasti Politik dan Politik Uang Sebagai Pemicu Kerawanan Pemilu: Studi Komparatif di Kabupaten Probolinggo dan Tuban, Jawa Timur

**Siti Kholifah*, Ucca Arawindha, Indhar Wahyu Wiraharjo,
Mohammad Fajar Shodiq Ramadhan, Siti Zurinani**

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*ifah_sosio@ub.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the comparative of election vulnerability level in Tuban and Probolinggo Regencies, East Java in 2024. The selection of Probolinggo and Tuban Regencies as representatives of regencies with the lowest and highest Vulnerability Index in East Java according to the Election Supervisory Agency (Bawaslu). This study uses a quantitative research method by deriving research variables from the Election Vulnerability Index concept from Bawaslu. Based on this concept, it is derived into a variable of Election Vulnerability Level with a measurement of four dimensions, namely the socio-political context, elections administration, contestation, and political participation. The data collection technique carried out through interviews using questionnaires, observation and document data. Determination of the number of respondents using the Slovin formula of 100 respondents taken simple randomly from the voter list in each district. The results of the study show that Probolinggo Regency exhibits a moderate level of election vulnerability higher than Tuban Regency, particularly regarding indicators of power relations, political dynasties, mobilization and money politics, conversely, Tuban Regency predominantly into the low vulnerability category. This is also supported by results of the Mann-Whitney U statistical test of the election vulnerability level between the two regencies with Z analysis = -3,3 and Sig=0,001, using an alpha of 0,05, it can be concluded that there is a difference in the level of election vulnerability level between Tuban and Probolinggo Regencies. This study assert that a difference from the results of the Election Vulnerability Index conducted by Bawaslu in 2022. This is due to rapidly changing political dynamics and the influence of socio-political factors.

Keywords: Money Politics; Political Dynasty; Level of Election Vulnerability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan tingkat kerawanan pemilu di Kabupaten Tuban dan Probolinggo, Jawa Timur pada tahun 2024. Pemilihan Kabupaten Probolinggo dan Tuban sebagai perwakilan kabupaten dengan Indeks Kerawanan terendah dan tertinggi di Jawa Timur menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menurunkan variabel penelitian dari konsep Indeks Kerawanan Pemilu dari Bawaslu. Berdasarkan konsep tersebut, maka diturunkan menjadi variabel Tingkat Kerawanan Pemilu dengan ukuran empat dimensi, yaitu konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner, observasi dan data dokumen. Penentuan jumlah responden menggunakan rumus slovin sebanyak 100 responden yang diambil secara *simple random* dari daftar pemilih di masing-masing kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kerawanan Pemilu di Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat kerawanan sedang yang lebih tinggi dibandingkan Tuban, terutama pada indikator relasi kuasa, dinasti politik,

mobilisasi dan politik uang, sedangkan Kabupaten Tuban lebih dominan pada tingkat kerawanan rendah. Hal ini juga diperkuat dari hasil uji statistik *Mann-Whitney U* tingkat kerawanan Pemilu diantara kedua kabupaten dengan *Z* analisis = -3,3 dan *Sig* = 0,001 dan menggunakan *alpha* 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan tingkat kerawanan Pemilu antara Kabupaten Probolinggo dan Tuban. Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan dengan hasil Indeks Kerawanan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh dinamika politik yang cepat berubah dan pengaruh faktor sosial-politik.

Kata Kunci: Politik Uang; Dinasti Politik; Tingkat Kerawanan Pemilu

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, sarana akuntabilitas politik, sekaligus instrumen representasi kepentingan warga negara. Pemilu tidak hanya menentukan pergantian kepemimpinan, tetapi juga mempengaruhi kualitas tata Kelola pemerintahan, partisipasi warga negara, serta pembangunan sosial ekonomi (Abramovitz et al., 2019; Hidayat, 2020). Penyelenggara pemilu yang berintegritas berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik dan stabilitas politik.

Sebaliknya, pemilu juga dapat memunculkan berbagai bentuk kerawanan sosial, seperti polarisasi politik, konflik horizontal, intimidasi pemilih, praktik politik uang, hingga menguatnya dinasti politik yang berpotensi mengurangi kualitas pemilu (Andriyani et al., 2021; Norris, 2014). Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap *electoral integrity* semakin meningkat seiring berkembangnya kajian mengenai kualitas demokrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kerawanan pemilu tidak hanya ditentukan oleh teknis penyelenggaraan, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial politik, kompetisi elite, relasi kekuasaan lokal dan perilaku pemilih (Gorrell et al., 2020; Norris, 2022; Onapajo & Babalola, 2020; Orlov, 2016). Di negara-negara demokrasi baru, termasuk Indonesia, praktik klientelisme, politik uang, serta pengaruh jaringan dinasti politik masih menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas pemilu (Aspinall & Berenschot, 2019; Simón, 2022). Oleh karena itu, kerawanan pemilu perlu dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan potensi pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan kualitas hubungan antar negara, elite politik dan masyarakat. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas kerawanan pemilu dari perspektif kelembagaan dan penegakan hukum.

Kusuma et al., (2019) menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pidana, administrasi dan kode etik Pemilu di Nusa Tenggara Barat. Fachrudin (2019) memfokuskan kajian pada identifikasi kerawanan dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara sebagai dasar legitimasi pemilu. Beberapa penelitian memfokuskan pada penyelenggaraan dan pengawasan pilkada serta efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu (Anam et al., 2023; Anwar, 2019; Siregar et al., 2021).

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek regulasi dan kelembagaan pengawasan pemilu, namun masih berorientasi pada evaluasi normatif-prosedural dan belum menjadikan persepsi masyarakat sebagai basis pengukuran kerawanan pemilu. Di sisi lain, berbagai studi juga menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal dipengaruhi oleh menguatnya praktik politik uang dan dinasti politik yang bekerja melalui hubungan patronase, jaringan keluarga, maupun distribusi sumber daya politik (Aspinall & Berenschot, 2019; Fossati et al., 2020; Muhtadi, 2021). Politik uang tidak hanya memengaruhi perilaku pemilih, tetapi juga memperkuat

ketergantungan politik masyarakat terhadap elit lokal. Demikian pula dinasti politik berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang mengurangi kompetisi politik yang sehat dan memperbesar peluang penyalahgunaan sumber daya politik.

Endang et al., (2021) menegaskan bahwa klientelisme dan patronase kekuasaan menjadi mekanisme utama yang melanggengkan relasi timpang antara elite dan masyarakat dalam demokrasi elektoral di Indonesia, di mana kuasa politik cenderung dipertukarkan dengan dukungan material maupun jaringan kekerabatan pemilih. Namun demikian kedua faktor tersebut masih relatif jarang dianalisis sebagai indikator kerawanan Pemilu berbasis persepsi pada masyarakat lokal, khususnya melalui studi komparatif antarwilayah dengan karakteristik merawanan yang berbeda. Indonesia menghadapi tantangan tersebut dalam penyelenggaraan pemilu yang melibatkan lebih dari 200 juta pemilih. Kompleksitas penyelenggaraan pemilu dalam konteks desentralisasi politik menyebabkan variasi tingkat kerawanan antardaerah menjadi semakin tinggi.

Bawaslu telah mengembangkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen untuk memetakan potensi kerawanan berdasarkan dimensi konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi politik. IKP 2022 menunjukkan bahwa kategori kerawanan di Jawa Timur termasuk rendah secara nasional, namun variasi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota tetap terjadi, sehingga membutuhkan kajian empiris yang lebih mendalam berbasis persepsi masyarakat, bukan semata-mata menggunakan data sekunder Bawaslu. Selain itu, Jawa Timur yang merupakan salah satu wilayah yang menempati kedudukan signifikan dalam dinamika politik di Tanah Air. Secara spesifik, penelitian ini menelaah Kabupaten Probolinggo dan Tuban, dimana menurut Indeks Kerawanan Bawaslu secara berurutan berada di kategori kerawanan rendah dan tinggi (Badan Pengawas Pemilu, 2020). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan tingkat kerawanan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo dan Tuban. Penelitian ini menggunakan data primer hasil survei di masyarakat dengan menggunakan empat dimensi IKP Bawaslu. Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan potret tingkat kerawanan pemilu berbasis pengalaman masyarakat, sekaligus mengidentifikasi bagaimana praktik uang dan dinasti politik menjadi faktor yang membedakan tingkat kerawanan antardaerah.

Metode

Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatif untuk mengetahui perbedaan tingkat kerawanan politik antara Kabupaten Probolinggo dan Tuban. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih tetap di kedua kabupaten berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di KPU: Probolinggo berjumlah 884.636 orang, dan Tuban berjumlah 934.444 orang. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin* dengan *margin of error* 10% dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, biaya serta homogenitas populasi (pemilih tetap pemilu). Sehingga dalam penelitian ini terdapat 100 responden di masing-masing kabupaten. Pengambilan sampel dilakukan secara *simple random sampling* dari data DPT di masing-masing kabupaten. Pengumpulan data dilakukan melalui data dokumen, observasi non partisipan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner pada mereka yang tercantum dalam daftar pemilih. Penurunan definisi operasional *variable* penelitian untuk dijadikan pertanyaan dalam kuesioner dengan cara mengadopsi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2022. Tingkat kerawanan pemilu diukur melalui 4 dimensi yaitu: dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi politik. Dimensi konteks sosial politik meliputi indikator keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, relasi kuasa (aktor lokal). Dimensi penyelenggaraan

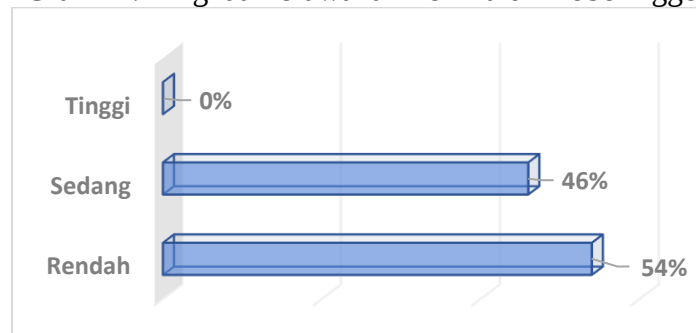
pemilu meliputi indikator hak pilih, pelaksanaan kampanye pemungutan suara, adjudikasi keberatan pemilu dan pengawasan pemilu. Dimensi kontestasi meliputi indikator hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Dimensi partisipasi politik meliputi indikator partisipasi pemilih, partisipasi partai politik dan partisipasi publik. Setelah pengumpulan data melalui kuesioner selesai, maka dilakukan skoring dan koding. Skoring tinggi diberikan pada jawaban responden yang menunjukkan adanya kerawanan pemilu. Sebaliknya skoring rendah diberikan pada jawaban responden yang menyatakan tidak adanya kerawanan pemilu. Tahap selanjutnya melakukan tabulasi data, yaitu memasukkan semua data responden dalam program SPSS. Data yang dimasukkan dalam SPSS sudah dalam bentuk skoring. Setelah proses tabulasi selesai maka bisa membuat tabel frekuensi dan tabel silang dari indikator penelitian. Selain itu, juga melakukan total skoring pada variabel tingkat kerawanan Pemilu di Kabupaten Probolinggo dan Tuban. Adapun kategori rendah: skor 81-161, kategori sedang: skor 162-243, kategori tinggi: skor 244-324. Proses analisis berikutnya melakukan uji statistik *Mann-Whitney U* untuk mengetahui perbedaan tingkat kerawanan Pemilu pada Kabupaten Probolinggo dan Tuban. Asumsi penggunaan uji statistik *Mann-Whitney U* adalah berhadapan dengan 2 sampel bebas, dan masing-masing elemen sampel mempunyai data paling rendah berskala ordinal. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1: Ada perbedaan tingkat kerawanan pemilu antara Kabupaten Probolinggo dan Tuban; H0: Tidak ada perbedaan tingkat kerawanan pemilu antara Kabupaten Probolinggo dan Tuban.

Hasil dan Pembahasan

1. Tingkat Kerawanan Pemilu Kabupaten Probolinggo

Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan tingkat kerawanan pemilu di Probolinggo mengarah ke sedang sebesar 46% dan rendah 54% (lihat Grafik 1). Hal ini bisa dijelaskan melalui 4 dimensi kerawanan pemilu meliputi: konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi dan partisipasi politik.

Grafik 1. Tingkat Kerawanan Pemilu di Probolinggo



(Sumber: Kuesioner Koding 8-88)

Penggunaan dimensi konteks sosial politik menunjukkan didominasi kategori rendah (56%) diukur dari 4 indikator: keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara dan relasi kuasa (aktor lokal). Indikator keamanan yang meliputi gangguan keamanan, kekerasan pada penyelenggara, kekerasan pada calon, kekerasan pada pemilih, kerusakan fasilitas publik, ketersediaan perangkat keamanan, serta adanya protes/demo/kerusakan menunjukkan mayoritas (87-100%) dari responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju baik sebelum, saat dan sesudah Pemilu. Kondisi ini menunjukkan di wilayah Probolinggo terkait indikator keamanan dianggap aman. Hal yang hampir sama juga terjadi pada indikator otoritas penyelenggara pemilu yang meliputi beberapa item: keberpihakan penyelenggara, rekrutmen penyelenggara bermasalah, pelanggaran azas dan prinsip, pelanggaran standar pelaksanaan dan koreksi putusan menunjukkan 84-98% responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju.

Hal ini menunjukkan otoritas penyelenggara pemilu dalam melakukan rekrutmen dan penyelenggaraan pemilu dianggap responden sudah sesuai dengan aturan dan standart yang ada, meskipun ada juga 16% responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju terkait dengan penyelenggara pemilu di tingkat desa berpihak pada calon anggota DPR/DPRD tertentu. Berkaitan dengan indikator otoritas penyelenggara negara yang diukur melalui item: tidak netralnya ASN, TNI, Polri, intimidasi Polri dan TNI, maladministrasi pemanfaatan anggaran menunjukkan 90-96% responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas penyelenggara negara tidak menggunakan wewenang dan posisinya dalam pelaksanaan pemilu, meskipun 10% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa penyelenggara negara (ASN/TNI/Polri) tidak netral dalam pemilu.

Tabel 1. Item Indikator Relasi Kuasa (Dalam Persen)

Pernyataan	STS	TS	S	SS
Ada caleg yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan aparat pemerintah desa.	12	35	35	18
Ada caleg yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pejabat daerah (camat/pejabat di tingkat kecamatan, bupati/pejabat di tingkat kabupaten atau kota).	9	40	44	7
Ada caleg yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan tokoh masyarakat.	4	28	45	23
Aparat pemerintah desa memberikan uang/barang kepada masyarakat untuk memilih caleg tertentu.	15	28	40	17
Pejabat daerah memberikan uang/barang kepada masyarakat untuk memilih caleg tertentu.	18	34	39	9
Tokoh masyarakat (tokoh pemuda/tokoh organisasi kemasyarakatan atau keagamaan) memberikan uang/ barang kepada masyarakat untuk memilih caleg tertentu.	19	15	36	30

Sumber: Kuesioner koding 42-44&48-50

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Sementara dari indikator relasi kuasa (aktor lokal) yang diukur melalui item: kekerabatan/dinasti politik, mobilisasi dengan intimidasi dan politik uang menunjukkan item kekerabatan/dinasti politik dan mobilisasi dengan politik uang 48-68% responden menjawab setuju dan sangat setuju (lihat tabel 1). Hal ini menunjukkan dinasti politik yang mempunyai hubungan dengan pejabat mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Politik uang juga mewarnai proses penyelenggaraan Pemilu di Probolinggo, dimana politik uang ini dilakukan oleh pejabat tingkat desa sampai kabupaten, bahkan juga oleh tokoh masyarakat dalam rangka untuk mempertahankan politik dinasti. Temuan penelitian mengenai relasi kuasa berbasis kekerabatan tersebut sejalan dengan rekam jejak politik lokal Probolinggo. Selama lebih dari 18 tahun (2003-2021), kekuasaan eksekutif Kabupaten Probolinggo dikuasai satu keluarga: Hasan Aminuddin menjabat Bupati dua periode (2003-2013), kemudian jabatan diteruskan istrinya, Puput Tantriana Sari, yang menjabat dua periode berikutnya (2013-2021).

Kondisi ini sejalan dengan persepsi responden mengenai relasi kuasa berbasis kekerabatan bukan sekadar persepsi subjektif, melainkan berkorelasi dengan fakta politik lokal yang terdokumentasi secara hukum dan akademik. Penelitian Ikmal (2018); dan Huda (2025) menunjukkan kekuatan *local strongman* dalam pemerintahan lokal Kabupaten Probolinggo merupakan basis patronase politik yang mengakar dalam struktur kekuasaan daerah, serta mampu memenangkan petahana. Politik dinasti di Kabupaten Probolinggo juga turut memengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan dalam sistem demokrasi lokal (Ilhami et al., 2025).

Berdasarkan dimensi penyelenggara pemilu didominasi kotegori rendah (54%), meskipun 1% juga ada di kategori tinggi. Dimensi ini diukur dari 4 indikator, yaitu: hak pilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, adjudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Dari 15 item untuk mengukur 4 indikator tersebut, 12 item menunjukkan mayoritas responden (90-96%) menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju terkait dengan item: 1) Data pemilih tidak komprehensif, akurat, dan mutakhir, 2) Distribusi logistik pemungutan suara terlambat/tertukar/hilang, 3) Akses TPS sulit dijangkau, 4) Proses pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, 5) Perhitungan tidak terbuka, 6) Rekapitulasi suara tidak akurat, 7) Penetapan hasil rekapitulasi tidak sesuai, 8) Penolakan dan pengulangan pemungutan/perhitungan suara, 9) Terjadi gugatan hasil pemilu, 10) Terjadi gugatan putusan MK, 11) Tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta pemilu, dan 12) Pengawas pemilu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun ada 3 item yang menunjukkan 24-55% responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju (lihat tabel 3).

Tabel 2. Item Dimensi Penyelenggara Pemilu (Dalam Persen)

Pernyataan	STS	TS	S	SS
Ada beberapa orang yang tidak bisa memilih dalam pemilu.	17	31	39	13
Peserta kampanye mengajak anak balita/kampanye diikuti anak di bawah usia 17 tahun.	20	25	31	24
Tidak tersedia layanan untuk disabilitas pada saat pemungutan suara (seperti surat suara <i>braille/braille template</i> , jalur kursi roda).	18	58	19	5

Sumber: Kuesioner Koding

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa persoalan di Probolinggo pada dimensi penyelenggara pemilu. Pertama, ada beberapa orang yang tidak bisa memilih dalam pemilu (merupakan item dari indikator hak pilih). Kedua, kampanye yang diikuti anak di bawah usia 17 tahun (merupakan item indikator pelaksanaan kampanye). Ketiga, tidak tersedia layanan untuk disabilitas pada saat pemungutan suara (merupakan item indikator pelaksanaan pemilu). Pada dimensi kontestasi yang diukur melalui 3 indikator, yaitu: hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Dimensi kontestasi menunjukkan 73% berada pada kategori sedang.

Dari 11 item indikator, 9 itemnya responden menyatakan 88-99% sangat tidak setuju dan tidak setuju terkait dengan pernyataan: 1) adanya kepengurusan dan keanggotaan ganda partai politik, 2) ketidakabsahan dokumen persyaratan caleg, 3) adanya mahar berupa uang atau posisi tertentu yang harus dibayar oleh caleg ke partai politik, 4) kampanye caleg di luar jadwal, 5) materi kampanye mengarah pada isu SARA/ujaran kebencian/*hoax*/kampanye hitam, 6) ada caleg yang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, 7) ada konflik antar caleg, 8) ada konflik antar caleg, 9) ada

caleg yang menggunakan anggaran desa/daerah untuk kampanye. Dalam artian 9 item ini selama ini menurut responden tidak menjadi masalah di Probolinggo. Rendahnya tingkat kerawanan pada item-item tersebut turut mengindikasikan relatif solidnya pelembagaan partai politik di tingkat lokal, sebagaimana ditemukan Jamil et al., (2024) dalam studi mengenai pelembagaan partai koalisi incumbent pada arena pilkada, maupun Rolis (2012) yang menyoroti performa partai politik dalam panggung Pilkada di Jawa Timur. Namun demikian masih ada beberapa persoalan yang muncul menurut responden terkait dengan 3 hal (lihat tabel 4).

Pertama, tidak ada caleg perempuan di wilayah tempat tinggal responden (item indikator hak pilih). Kedua, politik uang yang diberikan oleh Caleg pada calon pemilih/aparat/penyelenggara pemilu. Ketiga, adanya konflik antar pendukung caleg/parpol. Persoalan kedua dan ketiga merupakan item indikator kampanye calon.

Tabel 3. Item Dimensi Kontestasi (Dalam Persen)

Pernyataan	STS	TS	S	SS
Tidak ada caleg perempuan di wilayah tempat tinggal anda.	17	48	20	15
Adanya politik uang yang diberikan oleh caleg pada calon pemilih/aparat/penyelenggara pemilu.	23	22	34	21
Ada konflik antar pendukung caleg/parpol.	27	42	29	2

Sumber: Kuesioner Koding 71,77& 80

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Terakhir, dimensi partisipasi politik yang kategorinya hampir sama dengan dimensi kontestasi, dimana 77% berada pada kategori sedang dan 1% pada kategori tinggi dimensi ini diukur melalui 3 indikator, yaitu: partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik. Pada item indikator partisipasi pemilih menunjukkan 57-69% responden menyatakan setuju dan sangat setuju terkait dengan masih adanya individu yang tidak menggunakan hak pilihnya, kesulitan menggunakan hak pilih dalam pemilu serta adanya surat suara yang tidak sah dalam pemilu (lihat tabel 4).

Sedangkan di item indikator partisipasi penyelenggara pemilu dan partisipasi publik menunjukkan 90-93% responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju terkait dengan KPU dan Bawaslu tidak melakukan sosialisasi tentang proses dan pelaksanaan pemilu, serta masyarakat tidak melakukan pengawasan partisipatif pada saat kampanye, pemungutan dan perhitungan suara pemilu.

Tabel 4. Item Indikator Partisipasi Pemilih (Dalam Persen)

Pernyataan	STS	TS	S	SS
Masih ada orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.	17	17	43	23
Masih ada orang yang kesulitan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.	17	26	36	21
Ada surat suara yang tidak sah dalam pemilu.	17	14	51	18

Sumber: Kuesioner Koding 82-84, 2023

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Dari keempat dimensi tingkat kerawanan pemilu di Probolinggo menunjukkan 2 dimensi berperan menimbulkan tingkat kerawanan pemilu cenderung pada kategori sedang, yaitu: dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi politik. Meskipun secara

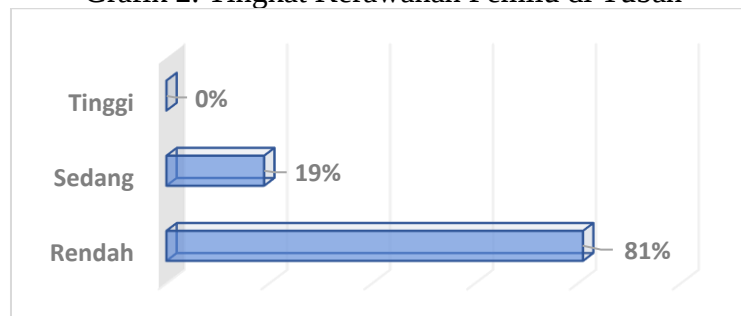
keseluruhan pada item yang ada di semua dimensi menunjukkan beberapa poin yang menimbulkan kerawanan pemilu di Probolinggo adalah politik dinasti, politik uang yang dilakukan oleh pejabat, tokoh masyarakat maupun caleg itu sendiri, partisipasi pemilih dalam pemilu (pemilih yang golput maupun yang kesulitan menggunakan hak pilihnya, dan surat suara yang tidak sah), serta kampanye yang mengajak balita atau diikuti oleh anak di bawah usia 17 tahun.

Temuan mengenai peran politik uang dalam kerawanan di Probolinggo ini selaras dengan tren nasional pasca-pemilu 2024. Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 (n=2.975, *exit poll* di 3.000 TPS) mencatat kenaikan proporsi pemilih transaksional dari 28% pada Pemilu 2019 menjadi 35% pada Pemilu 2024, sementara proporsi responden yang menilai politik uang oleh caleg/tim sukses sebagai hal tidak wajar menurun dari 67% menjadi 49,6% pada periode yang sama. Kesesuaian temuan lokal dengan tren nasional dan pemetaan kelembagaan tersebut menegaskan bahwa politik uang di Probolinggo bukan fenomena lokal yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari pola klientelisme elektoral yang lebih luas (Muhtadi, 2021).

2. Tingkat Kerawanan Pemilu Kabupaten Tuban

Tingkat kerawanan pemilu di Kabupaten Tuban berdasarkan hasil penelitian berada dalam kategori rendah dan sedang. Tingkat kerawanan tersebut memperlihatkan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut berdasarkan pada pemetaan terhadap dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi masyarakat. Secara umum hasil perhitungan terhadap tingkat kerawanan pemilu di wilayah tersebut dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Grafik 2. Tingkat Kerawanan Pemilu di Tuban



(Sumber: Kuesioner koding 8-88)

Tingkat kerawanan pemilu di Tuban menunjukkan 81% berada kategori rendah. Pengukuran terhadap kategori terhadap tingkat kerawanan tersebut berasal dari 4 dimensi. Pertama, dimensi konteks sosial politik berada dalam kategori rendah sebesar 86% dan sedang 14%. Dimensi ini mencakup pengukuran terhadap indikator-indikator keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara dan relasi kuasa (aktor lokal). Pada indikator keamanan terdapat tujuh item yang diukur yaitu: gangguan keamanan, kekerasan kepada penyelenggara, kekerasan pada calon, kekerasan pada pemilih, kerusakan fasilitas publik, protes atau demo atau kerusuhan dan tersedianya perangkat keamanan. Sebagian besar responden memberikan pernyataan sangat setuju dan setuju pada fase sebelum, saat, dan sesudah pemilu berlangsung. Pernyataan tersebut merepresentasikan indikator keamanan di kawasan ini dinilai aman oleh para responden. Berdasarkan indikator-indikator yang diukur dalam dimensi tersebut terdapat indikator yang memperlihatkan temuan menarik. Data mengenai indikator keamanan memberikan gambaran bahwa mayoritas responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tentang adanya protes atau demonstrasi atau kerusakan terkait dengan pemilu dengan persentase 64%.

Pernyataan ketidaksetujuan itu memperkuat penjelasan mengenai kategori kerawanan pemilu dari Dimensi Konteks Sosial Politik di Tuban yang berada dalam kategori rendah. Temuan lain yang menunjang klasifikasi Tuban dengan kategori tingkat kerawanan yang cenderung rendah tampak dalam indikator Otoritas Penyelenggara Pemilu. Indikator ini diterjemahkan ke dalam item-item keberpihakan penyelenggara, rekrutmen penyelenggara bermasalah, pelanggaran azas dan prinsip, pelanggaran standar pelaksanaan dan koreksi putusan.

Sebagian besar responden memberikan pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk item: 1) keberpihakan penyelenggara; 2) rekrutmen penyelenggara yang bermasalah; 3) pelanggaran azas dan prinsip; 4) pelanggaran standar pelaksanaan; 5) koreksi putusan atau putusan. Para responden memberikan tanggapan tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap item-item itu dengan persentase 77%-99%. Pernyataan yang disampaikan para responden itu menggambarkan penilaian terhadap otoritas penyelenggara pemilu yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu di Tuban juga ditunjang dengan keyakinan terhadap penyelenggara negara. Kondisi itu tampak dalam indikator 'Otoritas Penyelenggara Negara' yang direspon oleh para responden. Indikator ini diukur dengan item-item berikut ini: tidak netralnya ASN, TNI, Polri, intimidasi Polri dan TNI, maladministrasi pemanfaatan anggaran. Sebagian besar responden memberikan pernyataan sangat tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan dalam item tersebut di atas. Responden memberikan pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan jumlah sebesar 99%-100%.

Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa responden menilai otoritas penyelenggara negara tidak memiliki penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemilu di Tuban. Tidak hanya menampik penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara terhadap penyelenggara pemilu, para responden di Tuban juga menyangkal campur tangan pejabat daerah. Pada indikator relasi kuasa (aktor lokal) terdapat item kekerabatan atau dinasti politik, orang kuat lokal, mobilisasi dengan intimidasi dan politik uang.

Tampak sebagian besar responden memberikan pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju terkait dengan pernyataan yang berada di tiga indikator tersebut. Responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap terjadinya politik kekerabatan, orang kuat lokal dan mobilisasi dengan intimidasi dan politik uang di Tuban. Responden menyatakan 78%-97% tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap keberadaan dan terjadinya tiga hal tersebut di Tuban. Pernyataan itu menggambarkan penilaian responden bahwa tidak terjadi relasi kuasa (aktor lokal) di wilayahnya.

Tabel 5. Item Indikator Otoritas Penyelenggara Negara (dalam persen)

Pernyataan	STS	TS	S	SS
Penyelenggara negara (ASN/TNI/POLRI) tidak netral dalam pemilu.	52	48	0	0
Adanya intimidasi POLRI/TNI pada masyarakat.	47	52	1	0
Adanya intimidasi POLRI/TNI pada penyelenggara pemilu di tingkat desa.	54	46	0	0
Adanya intimidasi POLRI/TNI pada penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan.	43	56	0	1

Adanya penggunaan anggaran desa oleh aparat desa dalam mendukung kampanye atau kegiatan partai politik.	48	51	1	0
Adanya penggunaan anggaran negara oleh ASN/TNI/POLRI dalam mendukung kampanye atau kegiatan partai politik.	45	54	1	0

Sumber: Kuesioner Koding 42-44&48-50, 2023

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Berkaitan dengan dimensi penyelenggara pemilu berada dalam kategori rendah sebesar 71% dan sedang sebanyak 29%. Uraian terhadap Dimensi Penyelenggara Pemilu tersebut dapat diamati dalam item-item yang terdapat dalam aspek tersebut. Pada dimensi ini terdapat 15 item yang digunakan sebagai butir-butir untuk melakukan pengukuran. Dari keseluruhan item yang terdapat dalam dimensi ini mayoritas responden memberikan pernyataan sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk item-item: 1) hilangnya hak pilih; 2) tidak terlaksana kampanye sesuai ketentuan; 3) distribusi logistik pemungutan suara terlambat/tertukar/hilang; 4) akses TPS sulit dijangkau; 5) proses pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, 6) perhitungan tidak terbuka; 7) rekapitulasi suara tidak akurat; 8) Penetapan hasil rekapitulasi tidak sesuai; 9) penolakan dan pengulangan pemungutan/perhitungan suara; 10) terjadi gugatan hasil pemilu; 11) terjadi gugatan putusan MK; 12) tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta pemilu; dan 13) pengawas pemilu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 14) data pemilih tidak komprehensif, akurat, dan mutakhir; 15) tidak tersedianya layanan ramah disabilitas. Responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 58%-100%.

Mayoritas responden di wilayah Tuban memberikan pernyataan sangat setuju terhadap pernyataan data pemilih tetap tidak akurat dan mutakhir. Jumlah responden yang memberikan pernyataan semacam itu sebanyak 36%, sedangkan 31% lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai data pemilih tetap yang digunakan sebagai dasar pemilu di Tuban tidak akurat dan kurang mutakhir. Hal ini memperlihatkan adanya permasalahan data pemilih tetap di Tuban.

Temuan lain dari dimensi ini memperlihatkan penilaian yang menunjang kategori kerawanan pemilu di Tuban berada dalam kategori rendah dan sedang. Mayoritas responden di kawasan ini memberikan pernyataan tidak setuju terhadap pernyataan terjadi gugatan putusan MK terkait dengan persoalan pemilu. Responden dengan pernyataan semacam itu tercatat sebanyak 79%, selanjutnya 19% yang lain menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menilai tidak terjadi gugatan putusan MK yang terkait dengan persoalan pemilu yang terjadi di Tuban. Menurut responden gugatan semacam itu tidak terjadi pada pemilu.

Tabel 6. Item Indikator Penyelenggara Pemilu (Dalam Persen)

Pernyataan	STS	TS	S	SS
Data pemilih tetap tidak akurat dan mutakhir.	31	27	6	36
Ada beberapa orang yang tidak bisa memilih dalam pemilu.	25	44	21	10

Sumber: Kuesioner Koding, 2023

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Temuan lain dalam penelitian ini berkaitan dengan hasil pengukuran terhadap Dimensi Kontestasi. Dimensi ini diukur berdasarkan tiga indikator, antara lain Hak Politik, Proses Pencalonan dan Kampanye Calon. Ketiga indikator tersebut diturunkan

menjadi 10 item yang menjadi dasar bagi pertanyaan yang diberikan kepada responden. Hasil pengukuran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan kategori rendah sebesar 52% dan kategori sedang sebesar 48%. Perhitungan tersebut dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Pada dimensi kontestasi ini terdapat 10 item yang diukur terhadap para responden di Tuban. Sebagian besar responden memberikan pernyataan sangat tidak setuju dan tidak setuju pada item 1) adanya kepengurusan dan keanggotaan ganda partai politik; 2) ketidakabsahan dokumen persyaratan caleg; 3) adanya mahar berupa uang atau posisi tertentu yang harus dibayar oleh caleg ke partai politik; 4) kampanye caleg di luar jadwal; 5) materi kampanye mengarah pada isu SARA/ujaran kebencian/*hoax*/kampanye hitam; 6) praktik politik uang; 7) ada caleg yang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye; 8) ada konflik antar caleg; 9) ada caleg yang menggunakan anggaran desa/daerah untuk kampanye.

Responden memberikan penilaian tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 66%-99%. Sedangkan sebagian besar responden memberikan pernyataan sangat setuju setuju dan setuju untuk pernyataan ada caleg perempuan di wilayah tempat tinggal anda. Hal ini berarti responden penelitian di Tuban menilai komposisi calon legislatif yang berjenis kelamin perempuan sudah representatif.

Tabel 7. Item Indikator Kampanye Calon (Dalam Persen)

Pernyataan	STS	TS	S	SS
Kampanye caleg di luar jadwal kampanye.	50	46	3	1
Materi kampanye mengarah pada isu SARA/ujaran kebencian/ <i>hoax</i> /kampanye hitam.	60	38	0	2
Adanya politik uang yang diberikan oleh caleg pada calon pemilih/aparat/penyelenggara pemilu.	34	32	9	25
Ada caleg yang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.	43	51	2	4
Ada konflik antar caleg.	33	59	7	1
Ada konflik antar pendukung caleg/parpol.	29	49	12	10
Ada caleg yang menggunakan anggaran desa/daerah untuk kampanye.	40	54	3	3

Sumber: Kuesioner Koding 71,77& 80, 2023

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Dimensi terakhir yang diukur dalam penelitian ini merupakan Partisipasi Politik. Dimensi Partisipasi Politik di Tuban berada di kategori sedang sebesar 78%, rendah 19% dan tinggi 3%. Pengukuran ini berdasarkan telaah terhadap indikator partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik. Pengukuran terhadap indikator partisipasi pemilih memperlihatkan sebagian besar responden memberikan pernyataan setuju dan sangat setuju. Pada item partisipasi pemilih responden memperlihatkan 56%-57% jawaban setuju dan sangat setuju untuk memperlihatkan terjadinya keberadaan pemilih yang tidak memanfaatkan hak pilih dan suara tidak sah dalam pemilu.

Lebih lanjut, responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk item partisipasi partai politik dan partisipasi publik dengan bentuk konkret KPU dan Bawaslu yang tidak memberikan sosialisasi tentang proses dan pelaksanaan pemilu, serta masyarakat yang tidak melakukan partisipatif. Pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju itu menunjukkan 73%-83%.

Tabel 8. Item Indikator Partisipasi Pemilih (Dalam Persen)

Pernyataan	STS	TS	S	SS
Masih ada orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.	13	31	29	27
Masih ada orang yang kesulitan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.	11	56	20	13
Ada surat suara yang tidak sah dalam pemilu.	15	29	24	32

Sumber: Kuesioner Koding 82-84, 2023

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Dimensi-dimensi yang terkait dengan tingkat kerawanan pemilu di Tuban memperlihatkan dimensi yang berperan penting dalam pengukuran. Dimensi yang menempati pengaruh penting sehingga pengukuran di Tuban cenderung berada dalam kategori rendah adalah dimensi konteks sosial politik dan dimensi penyelenggaraan. Aspek-aspek yang penting diperhatikan dalam kerawanan pemilu berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penetapan data pemilih yang harus akurat dan mutakhir, politik uang, orang-orang yang tidak menggunakan hak pilih, dan surat suara yang tidak sah.

Karakter kerawanan Tuban yang bersifat administratif-prosedural pola ini juga sejalan dengan temuan Irawatiningrum & Rohid (2021) yang mengidentifikasi praktik politik uang pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Tuban, sehingga menunjukkan bahwa isu politik uang tidak sepenuhnya absen di Tuban, meskipun secara keseluruhan tingkat kerawanannya tetap tergolong rendah dibandingkan Probolinggo.

3. Perbandingan Tingkat Kerawanan Pemilu Antara Kabupaten Probolinggo dan Tuban

Hasil uji statistik *Mann-Whitney U* tingkat kerawanan pemilu diantara kedua kabupaten adalah 3649,5 dengan $Z = -3,3$. Titik kritis menggunakan $\alpha = 0,05$ sebagai mana digunakan dalam penelitian ilmu sosial, dan $\text{sig.} = 0,001$, maka sig. lebih kecil dari α ($0,001 < 0,05$), sehingga keputusannya adalah H_1 diterima pada $\alpha 0,05$ (5%). Oleh karena itu dapat disimpulkan ada perbedaan tingkat kerawanan pemilu antara Kabupaten Probolinggo dan Tuban pada $\alpha 0,05$.

Tabel 9. Uji Statistik *Mann-Whitney U*

Ranks				
	Wilayah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Tingkat Kerawanan Pemilu	Tuban	100	87.00	8699.50
	Probolinggo	100	114.01	11400.50
	Total	200		

Test Statistics^a

Tingkat Kerawanan Pemilu	
<i>Mann-Whitney U</i>	3649.500
<i>Wilcoxon W</i>	8699.500
<i>Z</i>	-3.300
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.001

Sumber: SPSS, 2024

a. *Grouping Variable*: Kab. Probolinggo-Kab. Tuban

Mean rank kerawanan Pemilu yang lebih tinggi di Probolinggo selaras dengan rekam jejak politik dinasti 18 tahun keluarga Hasan Aminuddin-Puput Tantriana Sari, serta temuan survei bahwa 46% responden Probolinggo berada pada kategori kerawanan sedang, jauh lebih tinggi dibanding Tuban. Sebaliknya, median *rank* kerawanan yang lebih rendah di Tuban konsisten dengan karakter permasalahan yang lebih bersifat administratif-prosedural, seperti akurasi data pemilih dan netralitas ASN, tanpa riwayat relasi kuasa berbasis dinasti politik yang menonjol.

Konvergensi antara bukti statistik inferensial, data deskriptif kuesioner, dan data dokumenter/kelembagaan ini memperkuat validitas temuan bahwa perbedaan tingkat kerawanan pemilu antara Probolinggo dan Tuban bukan sekadar kebetulan statistik, melainkan mencerminkan perbedaan struktural dalam relasi kuasa dan budaya politik lokal di kedua daerah. Perbedaan tingkat kerawanan pemilu ini dapat dimaknai adanya penguasaan elite lokal (*local elite capture*) atas sumber daya politik. Di Probolinggo, dominasi satu keluarga atas jabatan eksekutif selama 18 tahun menciptakan struktur relasi patron-klien yang mengakar, di mana loyalitas politik dibangun melalui jaringan kekerabatan dan transaksi material, bukan melalui program atau kompetisi gagasan.

Struktur relasi kuasa semacam ini, dalam kerangka Robison & Hadiz (2004) mengenai oligarki lokal pasca-Reformasi, cenderung melanggengkan kerawanan sosial karena kompetisi elektoral berubah menjadi ajang mempertahankan akses terhadap sumber daya publik oleh kelompok elite yang sama, sehingga masyarakat berada dalam posisi rawan dimobilisasi, baik melalui intimidasi maupun politik uang. Selain jaringan kekerabatan dan sumber daya material, identitas agama turut menjadi instrumen mobilisasi politik di Probolinggo Jailani et al., (2025) hal ini semakin memperkuat pola patronase dalam ranah politik.

Sebaliknya, tingkat kerawanan pemilu yang lebih rendah di Tuban mengindikasikan struktur kekuasaan lokal yang relatif lebih terdesentralisasi dan tidak dikuasai oleh satu jaringan kekerabatan dominan, sehingga potensi kerawanan yang muncul lebih bersifat teknis-administratif ketimbang bersumber dari kontestasi elite yang tertutup. Dengan demikian, perbedaan tingkat kerawanan pemilu antara kedua kabupaten bukan sekadar perbedaan derajat (*gradual*), melainkan mengindikasikan perbedaan jenis (kategorial) dalam sumber kerawanan itu sendiri: kerawanan yang bersifat struktural-relasional di Probolinggo, dan kerawanan yang bersifat prosedural-teknis di Tuban. Implikasinya, strategi mitigasi yang diperlukan pun berbeda; Probolinggo membutuhkan intervensi yang menysasar tata kelola kekuasaan dan pengawasan dana kampanye, sementara Tuban lebih membutuhkan penguatan kapasitas teknis penyelenggara dalam pemutakhiran data pemilih dan penjagaan netralitas aparat.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pemilu di Kabupaten Probolinggo rendah 54% dan sedang 46%, sedangkan Kabupaten Tuban menunjukkan tingkat kerawanan rendah 81% dan sedang 19%. Perbedaan tingkat kerawanan pemilu di kedua daerah ini juga diperkuat hasil uji statistik *Mann-Whitney U* dengan Z analisis = -3,3 dan $Sig = 0,001$, dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan ada perbedaan tingkat kerawanan pemilu antara Kabupaten Probolinggo dan Tuban. Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan dengan survei yang dilakukan oleh Bawaslu melalui pengukuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh dinamika politik di masing-masing daerah yang cepat berubah dan pengaruh faktor sosial-politik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan aman. Keterkaitan antara dimensi relasi kuasa dan politik uang yang ditemukan di Probolinggo dapat dipahami melalui kerangka klientelisme elektoral, yakni

pola relasi patron-klien yang muncul akibat lemahnya ikatan antara kandidat dan pemilih sehingga transaksi material menjadi jalan pintas mobilisasi suara. Dalam kerangka ini, dinasti politik menyediakan jejaring kekuasaan lokal, sedangkan politik uang menjadi instrumen operasional untuk merawat jejaring tersebut pada setiap musim pemilu. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kedua dimensi tersebut secara konsisten muncul bersamaan dalam temuan penelitian ini di Kabupaten Probolinggo.

Daftar Pustaka

- Abramovitz, M., Sherraden, M., Hill, K., Smith, T. R., Lewis, B., & Mizrahi, T. (2019). Voting is Social Work: Voices From the National Social Work Voter Mobilization Campaign. *Journal of Social Work Education*, 55(4), 626-644.
- Anam, M. S., Prayitno, S., & Musyafa'ah, N. L. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 96-116.
- Andriyani, L., Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39-64
- Anwar, A. H. (2019). Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 73-89.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Badan Pengawas Pemilu. (2020). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*.
- Endang, M., Suyuti, N., Bahtiar, B., Hussein, M. N., & Hasdin, H. (2021). *Demokrasi Yang Terjual: Klientelisme-Kuasa & Politik Patronase dalam Demokrasi Elektoral*. Kupang: Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Fachrudin, A. (2019). Kerawanan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Pemilu 2019. *Jurnal Demokrasi*, 77.
- Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological Representation In Clientelistic Democracies: The Indonesian Case. *Electoral Studies*, 63, 1-12.
- Gorrell, G., Bakir, M. E., Roberts, I., Greenwood, M. A., & Bontcheva, K. (2020). Online Abuse Toward Candidates During The UK General Election 2019: Working Paper. *White Rose Research Online*, 1-21.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 72-85.
- Huda, M. (2025). Sirkulasi Modal Sosial dalam Politik Elektoral: Strategi Ketahanan Mukhammad Misbakhun sebagai Caleg Petahanan. *Brawijaya: Journal of Social Science*, 5(1), 48-69.
- Ikmal, N. M. (2018). *Patronase Politik Dalam Pemerintah Lokal (Studi Kekuatan Local Strongman Di Kabupaten Probolinggo)*. Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.
- Ilhami, D., Al-Khanif, A. K., & Soetijono, I. R. (2025). Pengaruh Politik Dinasti di Kabupaten Probolinggo Terhadap Sistem Demokrasi Dalam Menjalankan Asas Keterbukaan: The Influence of Dynasty Politics in Probolinggo Regency on the Democracy System in Implementing the Principle of Openness. *Constitution Journal*, 4(2), 191-210.

- Irawatiningrum, S., & Rohid, N. (2021). Politik Uang Dan Pemilu Serentak 2019 Di Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 353-361.
- Jailani, A., Astuti, V. S., & Devi, N. U. K. (2025). Pengaruh Identitas Agama Terhadap Keberpihakan Pemilih Pada Kandidat Bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(3), 346-354.
- Jamil, D., Maksum, A., Sopyan, A. R., & Huda, A. (2024). Pelembagaan Partai Politik: Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada. *Jurnal Dinamika: Wacana Mahasiswa Berparadigma*, 5(1), 45-62.
- Kusuma, L. S., Zulhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Ulul Albab*, 23(2), 110-116.
- Muhtadi, B. (2021). *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, P. (2022). *In Praise of Skepticism: Trust but Verify*. Oxford: Oxford University Press.
- Onapajo, H., & Babalola, D. (2020). Nigeria's 2019 General Elections A Shattered Hope? *The Round Table*, 109(4), 363-367.
- Orlov, V. (2016). The Problem of Election Administration Professionalization in Modern Public Administration in Ukraine. *Sociological Studios*, 2(9), 83-87.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.
- Rolis, M. I. (2012). Performance Partai Politik Dalam Panggung Pilkada Jawa Timur. *Jurnal Review Politik*, 2(1), 58-79.
- Simón, P. (2022). The Multiple Spanish Elections of April and May 2019: The Impact of Territorial and Left-right Polarisation. *South European Society and Politics*, 25(1), 1-31.
- Siregar, M., Arifin, M., & Darsono, D. (2021). Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 76-86.